

## Kapita Selekta Psikologi Sosial: Menggali Akar Polarisasi Politik di Indonesia, Kekuatan atau Ancaman bagi Demokrasi Indonesia?

Atika Marlef<sup>1</sup> Indah Pratiwi<sup>2</sup> Masyhuri<sup>3</sup>

Program Studi Magister Psikologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [atikamarlef@gmail.com](mailto:atikamarlef@gmail.com)<sup>1</sup> [indahpratiwi0030@gmail.com](mailto:indahpratiwi0030@gmail.com)<sup>2</sup> [masyhuri@uin-suska.ac.id](mailto:masyhuri@uin-suska.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*The phenomenon of polarization does not only occur in the stages before the General Election, but also continues after the Election. Political polarization refers to the division of society into two or more groups that have significantly different views, ideologies, or interests. In this context, polarization occurs when society is divided into two opposing camps, often due to certain political issues, ideologies, or conflicting policies. This research uses the library method, namely research that is identical to text or discourse analysis activities that investigate an event, whether in the form of actions or writings that are studied to obtain precise facts such as finding the origin, true causes, and so on. It is hoped that this research can increase insight and knowledge about political polarization in Indonesia.*

**Keywords:** Polarization, Political.

### Abstrak

Fenomena polarisasi tidak hanya terjadi dalam tahapan sebelum Pemilihan Umum (Pemilu), namun juga berlanjut hingga pasca Pemilu. Polarisasi politik merujuk pada pembagian masyarakat menjadi dua atau lebih kelompok yang memiliki pandangan, ideologi, atau kepentingan yang berbeda secara signifikan. Dalam konteks ini, polarisasi terjadi ketika masyarakat terpecah dalam dua kubu berlawanan, seringkali disebabkan oleh isu-isu politik tertentu, ideologi, atau kebijakan yang saling bertentangan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu penelitian yang identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana yang menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat seperti menemukan asal-usul, sebab penyebab sebenarnya, dan sebagainya. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Polarisasi politik di Indonesia.

**Kata Kunci:** Polarisasi, Politik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Terminologi polarisasi dewasa ini kerap dijumpai dalam studi yang menggambarkan kondisi politik di Indonesia (Karim, 2019; Warburton, 2020; Afrimadona, 2021; Jati, 2022). Telah terjadi polarisasi yang sangat kuat sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Fenomena polarisasi tidak hanya terjadi dalam tahapan sebelum Pemilihan Umum (Pemilu), namun juga berlanjut hingga pasca Pemilu (Karim, 2019). Fossati (2019) menyebutkan bahwa saat ini politik di Indonesia mempertemukan dua spektrum antara kelompok pluralis dan Islamis. Ia menggambarkan kelompok pluralis sebagai sekularis yang menyukai pemisahan yang jelas antara Islam dan negara. Meskipun kelompok ini tidak serta-merta menentang nilai-nilai agama yang memainkan peran tertentu dalam kehidupan publik, mereka tidak melihat Islam, atau agama lain, pantas mendapatkan status khusus dalam hubungan negara dan agama. Di sisi lain, kelompok Islamis digambarkan sebagai kelompok yang percaya bahwa Islam harus memiliki posisi istimewa dalam kehidupan publik dibandingkan dengan agama lain.

Beberapa studi politik menjelaskan bahwa polarisasi politik di Indonesia menguat kembali, terutama sejak Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019 (Karim, 2019; Warburton, 2020;

Afrimadona, 2021; Jati, 2022). Padahal, beberapa studi politik pada periode sebelumnya sudah menganggap bahwa polarisasi politik melemah, karena menurunnya pengaruh ideologi, orientasi keagamaan, dan aliran (Ufen, 2006; Liddle & Mujani, 2007), selain itu juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan (Warburton, 2020). Perbedaan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengapa polarisasi politik di Indonesia, khususnya antara kelompok Islamis dan pluralis, muncul kembali setelah sekian lama meredup? Padahal, periode Orde Baru, dengan sistem politik yang represif hingga era reformasi dengan sistem politik terbuka, pada awalnya dapat menekan polarisasi politik di Indonesia. Polarisasi politik yang kuat pernah terjadi di Indonesia pada periode 1950-an hingga 1960-an, yang diakibatkan oleh politik aliran. Namun, kemudian kembali menurun di rezim Orde Baru. Tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka ruang politik, yang sebelumnya tertutup akibat pemerintahan yang represif. Terbukanya ruang politik pada era Reformasi pada awalnya tetap menekan polarisasi politik, karena menurunnya pengaruh ideologi, orientasi keagamaan, dan aliran. Namun, polarisasi politik di Indonesia kembali muncul pada tahun 2014 (Karim, 2019; Warburton, 2020; Afrimadona, 2021; Jati, 2022).

Polarisasi lebih merupakan fenomena populer yang berkembang di tingkat massa, ketimbang elite politik. James Q Wilson dalam Tesriono (2018) menjelaskan bahwa komitmen kuat terhadap kandidat dalam pemilu dapat berpengaruh pada terbentuknya polarisasi di kalangan pemilih. Masyarakat menjadi tidak terlalu peka terhadap siapa koalisi partai politik yang ada, namun cenderung lebih melihat pasangan calon yang berpartisipasi dalam kontestasi politik. Selain itu polarisasi dapat diakibatkan oleh suatu perubahan framing komunikasi politik suatu partai. Perubahan framing tersebut dapat terjadi dikarenakan oleh perubahan peta politik atau bahkan perubahan budaya politik, sehingga mengakibatkan pendukung partai mengikuti hasil dari perubahan frame komunikasi dari partai politik yang diikutinya. Di sini, efek framing terlihat ketika suatu pihak mendeskripsikan suatu isu atau fenomena dengan penekanan pada suatu subset yang menjadi titik-titik pertimbangan hingga dapat mempengaruhi pembentukan opini individu (Druckman dan Nelson, 2003) dalam (Druckman, Peterson dan Slothuus, 2013). Hal ini senada dengan pernyataan dari Slothuus (2010) dalam (Druckman, Peterson dan Slothuus, 2013) yang menyatakan bahwa ketika suatu partai mengubah framing komunikasi politik, maka para pendukung partai tersebut akan mengikutinya. Slothuus dan de Vreese (2010) dalam (Druckman, Peterson dan Slothuus, 2013) menemukan bahwa framing komunikasi yang disponsori partai memiliki pengaruh yang lebih besar kepada isu-isu adanya konflik antar partai. Berdasarkan pernyataan itu, Druckman, Peterson dan Slothuus (2013) mengaitkan dengan theory of motivated reasoning. Teori tersebut menjelaskan fenomena bagaimana seseorang memiliki kecenderungan untuk mencari informasi yang mengkonfirmasi pemikiran mereka (alias konfirmasi bias) dan cenderung berdebat dan menolak bukti yang bertolak belakang dengan biasanya. Pada ranah offline, polarisasi politik pun telah mencuat menjadi konflik berupa gesekan fisik (Rif'an, 2018). Pada awal tahun 2018 sempat terjadi bentrokan fisik dalam kegiatan Car Free Day di Jakarta, dimana bentrokan fisik terjadi antara massa pendukung Prabowo yang menggunakan kaos #2019GantiPresiden dan massa pendukung Jokowi yang menggunakan kaos #DiaSibukKerja (Rif'an, 2018). Sementara itu ranah online, polarisasi politik masyarakat terlihat melalui opini publik di media sosial yang semakin terbelah. Kemudian dampak negatif besar yang terjadi adalah polarisasi opini, hingga perilaku politik dan fragmentasi sosial. Media baru tidak hanya memberi tahu masyarakat mengenai isu yang harus dipikirkan, melainkan juga bagaimana bertindak terhadap isu tersebut. Hal ini menjadi ancaman besar bagi kesatuan negara, terutama menjelang pemilihan umum di mana media massa, baik secara konvensional maupun daring, kemungkinan menyisipkan kepentingan politik tertentu dalam pemberitaannya (Novelia, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, berupa data primer dari berbagai buku. Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran dari data daring dan berbagai tayangan televisi serta Youtube, dengan menganalisis wacana kemudian menginterpretasikan dalam bentuk-bentuk representasi paham radikalisme melalui media sosial, khususnya pada kalangan generasi milenial. Data yang terkumpul kemudian dipelajari dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Saat menganalisis, penulis melakukan kajian ulang dan pengkategorian terhadap keseluruhan data yang terkumpul agar penelitian dapat dilakukan dengan mudah sampai pada pembuatan kesimpulan. Jika saat proses analisis dibutuhkan tambahan data, penulis mencari tambahan data sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Polarisasi Politik**

Secara konseptual, para ilmuwan politik memiliki pandangan yang beragam mengenai polarisasi. Polarisasi terbagi dalam dua hal, pertama sebagai keadaan dan kedua sebagai proses. Polarisasi sebagai suatu keadaan mengacu kepada sejauh mana suatu masalah ditentang dalam kaitannya dengan beberapa paradigma, sedangkan polarisasi yang dianggap sebagai proses mengacu kepada peningkatan oposisi dari waktu ke waktu (DiMaggio et al., 1996). Selain itu, polarisasi menekankan kehadiran simultan dari prinsip, kecenderungan, atau sudut pandang yang berlawanan atau bertentangan (Fiorina & Abrams, 2008), sedangkan polarisasi juga dipandang sebagai peningkatan dukungan untuk pandangan politik ekstrim dibandingkan dengan dukungan untuk pandangan sentris atau moderat (McCarty, 2019). McCoy dan Somer (2019) mendefinisikan polarisasi sebagai proses ketika keragaman atau perbedaan dalam masyarakat semakin selaras dalam satu dimensi, dan orang-orang semakin mempersepsikan, serta menggambarkan politik dan masyarakat dalam istilah "kami" versus "mereka". Istilah "kami" versus "mereka" merupakan suatu keadaan masyarakat yang terpecah dan saling tidak percaya. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa polarisasi politik merujuk kepada terpecahnya masyarakat akibat adanya perbedaan pilihan politik, yang mana dalam perpecahan ini muncul rasa saling tidak percaya dan kebencian, sehingga memunculkan permusuhan.

Munculnya polarisasi politik tidak selalu disebabkan karena pembelahan sosial, politik yang mendasar, atau susunan institusional tertentu, tetapi muncul ketika aktor politik mengejar tujuan politik mereka dengan menggunakan strategi polarisasi, seperti memobilisasi pemilih dengan memecah belah, menyebarkan ujaran kebencian, dan mengeksploitasi keresahan masyarakat, dan respons oposisi yang menggunakan taktik serupa (McCoy & Somer, 2019). Hasil studi McCoy dan Somer menunjukkan bahwa polarisasi tidak dapat dijelaskan sesederhana adanya dan polarisasi politik tidak selalu sesuai dengan perpecahan sosial politik atau formative rifts. Mereka berpendapat bahwa polarisasi politik terjadi, karena aktor politik berusaha mengeksploitasi keresahan untuk mengaktifkan kebencian berdasarkan perpecahan sosial politik dan formative rifts atau merangkai formative rifts dengan perpecahan lainnya. McCoy dan Somer (2019) mengidentifikasi tiga jenis keresahan utama. Pertama adalah keresahan politik atau krisis perwakilan. Keresahan ini timbul akibat adanya kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan merasa tidak terwakili. Kedua adalah keresahan ekonomi. Ekonomi adalah sasaran empuk untuk dieksploitasi oleh aktor politik, karena berkaitan dengan ketimpangan ekonomi yang dapat berfungsi sebagai alat mobilisasi. Ketiga adalah keresahan kultural. Keresahan kultural ini juga berkaitan dengan agama, misalnya perdebatan antara Gereja versus Negara, atau antara pemikiran sekuler dan konservatif di antara penganut agama

yang sama. Mereka juga berpendapat bahwa keresahan kultural bisa muncul dari perasaan kehilangan atau adanya ancaman kehilangan status sosial atau ekonomi oleh kelompok dominan dalam masyarakat.

Analisis McCoy dan Somer (2019) juga menjelaskan pola polarisasi. Menurut mereka, polarisasi dimulai ketika para pemimpin politik dan pendukungnya menggambarkan kelompok politik mereka dan kelompok politik lawan dalam istilah “hitam” dan “putih” atau “baik” dan “jahat”. Banyak dari studi kasus mereka melibatkan pemimpin populis yang membungkus populisme dengan narasi polarisasi. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam sebagian besar kasus polarisasi, aktor politik menggolongkan masyarakat sebagai “baik” dan elite sebagai “jahat”, dengan begini para aktor politik dapat mencerca kemapanan atau elite, menyalahkan elite atas penderitaan rakyat, sambil menjunjung tinggi kebajikan “rakyat” yang mereka klaim untuk diwakili. Ketika kelompok lawan membalas dengan strategi yang serupa, dinamika polarisasi terjadi. McCoy dan Somer (2019) mencontoh kasus di Venezuela, ketika pendukung Hugo Chavez diberi nama chusmas (geng) oleh lawan politik mereka, sedangkan pendukung Chavez menggunakan istilah sifrinos (slang dari sebuah lagu tentang seorang wanita kaya dan bodoh yang hanya peduli dengan kemewahan) untuk mengacu kepada oposisi kelas menengah dan atas. Penggolongan dan pelabelan kelompok tersebut menimbulkan efek psikologis, bahwa identitas sosial mengerahkan anggota kelompok untuk memegang sentimen positif terhadap anggota dan sentimen negatif terhadap kelompok lawan. Efek psikologis ini menjadi penting, karena sebagai mekanisme dehumanisasi, depersonalisasi, dan stereotip yang bermuara kepada kebencian emosional, ketakutan, dan rasa saling tidak percaya. McCoy dan Somer berpendapat bahwa politisi yang menggunakan simbol dan bahasa untuk menciptakan identitas “kita” versus “mereka”, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, akan berkontribusi atas terciptanya mekanisme psikologis ini.

### **Bentuk-bentuk Polarisasi Politik**

Polarisasi politik dapat terbentuk dalam berbagai cara dan mencakup aspek-aspek berbeda dari kehidupan politik dan sosial masyarakat. Bentuk-bentuk polarisasi politik biasanya bergantung pada konteks sosial, budaya, dan ekonomi di negara atau komunitas tertentu. Berikut adalah beberapa bentuk utama dari polarisasi politik:

1. Polarisasi Ideologis. Polarisasi ideologis terjadi ketika partai-partai politik atau kelompok-kelompok dalam masyarakat terpecah berdasarkan pandangan ideologis yang ekstrem, seperti antara konservatif dan progresif, atau antara sayap kanan dan sayap kiri. Dalam polarisasi ini, kubu-kubu politik cenderung memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang berbagai isu, termasuk ekonomi, hak asasi manusia, kebijakan luar negeri, hingga kebijakan lingkungan. Contoh: Di banyak negara, ada perpecahan antara kelompok yang mendukung pasar bebas dan kapitalisme (sering diidentikkan dengan kanan) dan kelompok yang mendukung kebijakan kesejahteraan sosial atau intervensi negara yang lebih besar (diidentikkan dengan kiri).
2. Polarisasi Sosial. Polarisasi sosial terjadi ketika perbedaan pandangan politik mulai dipengaruhi oleh identitas sosial seperti agama, etnis, kelas sosial, atau identitas budaya. Polarisasi ini sering kali mengakibatkan segregasi sosial, di mana orang-orang berinteraksi dan hidup dalam kelompok yang memiliki identitas dan pandangan politik yang serupa. Contoh: Di beberapa negara, polarisasi agama dapat mempengaruhi pandangan politik, misalnya antara kelompok mayoritas agama dan minoritas agama. Perbedaan ini bisa memunculkan ketegangan dalam isu-isu seperti hak-hak minoritas, hukum syariah, atau kebijakan negara sekuler.

3. **Polarisasi Politik Identitas.** Polarisasi politik identitas muncul ketika perpecahan politik didasarkan pada identitas kelompok, seperti gender, ras, suku, agama, atau orientasi seksual. Dalam bentuk ini, identitas kelompok sering kali menjadi dasar untuk menentukan preferensi politik, sehingga perdebatan politik sering kali fokus pada isu-isu yang terkait dengan hak-hak kelompok tertentu. Contoh: Di Amerika Serikat, perbedaan politik antara pendukung hak-hak LGBTQ+ dan mereka yang menolak hak-hak tersebut, atau perbedaan antara gerakan Black Lives Matter dengan kelompok yang memprioritaskan narasi nasionalisme kulit putih.
4. **Polarisasi Ekonomi.** Polarisasi ekonomi terjadi ketika masyarakat terpecah berdasarkan kelas ekonomi, seperti antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Polarisasi ini sering terkait dengan perbedaan pandangan mengenai kebijakan redistribusi kekayaan, pajak, subsidi pemerintah, dan peran negara dalam ekonomi. Contoh: Polarisasi antara kelompok elit bisnis yang mendukung pajak rendah dan deregulasi dengan kelompok pekerja atau masyarakat berpenghasilan rendah yang mendukung kebijakan redistributif seperti kenaikan upah minimum atau program kesejahteraan sosial.
5. **Polarisasi Partisan.** Polarisasi partisan terjadi ketika dua partai politik utama atau beberapa partai saling berseberangan dengan pandangan yang sangat berbeda, dan para pemilih menjadi semakin loyal kepada partai mereka. Polarisasi ini sering menyebabkan ketidakmampuan untuk berkompromi atau mencapai kesepakatan dalam kebijakan publik. Contoh: Di banyak sistem politik, seperti di Amerika Serikat, perpecahan yang tajam antara Partai Demokrat dan Partai Republik menggambarkan polarisasi partisan yang kuat. Pemilih cenderung memilih partai mereka berdasarkan kesetiaan, bahkan ketika mereka tidak setuju dengan seluruh agenda partai.
6. **Polarisasi Agama.** Dalam beberapa kasus, polarisasi politik dapat terbentuk di sepanjang garis keagamaan, di mana kelompok-kelompok yang berbeda agama mengembangkan pandangan politik yang sangat berbeda. Hal ini dapat terjadi di negara-negara di mana agama memainkan peran penting dalam kehidupan publik, dan isu-isu terkait agama sering kali menjadi sumber perdebatan politik. Contoh: Polarisasi antara kelompok Islamis yang mendukung penerapan hukum syariah di negara-negara mayoritas Muslim dengan kelompok sekuler yang menolak pengaruh agama dalam politik.
7. **Polarisasi Media.** Media massa, terutama dengan berkembangnya media sosial, dapat memfasilitasi polarisasi politik. Polarisasi media terjadi ketika platform berita atau media sosial secara aktif mempromosikan satu sudut pandang politik yang memperkuat keyakinan kelompok tertentu, sehingga mempersempit wawasan masyarakat dan memperburuk keterbelahan politik. Contoh: Saluran berita yang secara terbuka berpihak pada kelompok politik tertentu, seperti Fox News di Amerika Serikat yang lebih condong ke konservatif, atau MSNBC yang lebih dekat dengan kaum liberal.
8. **Polarisasi Regional atau Geografis.** Polarisasi ini terjadi ketika wilayah geografis tertentu memiliki pandangan politik yang berbeda secara signifikan dengan wilayah lain. Polarisasi ini bisa diperburuk oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau antara kawasan industri dan kawasan pertanian. Contoh: Di banyak negara, wilayah perkotaan cenderung lebih liberal atau progresif, sementara wilayah pedesaan cenderung lebih konservatif. Perpecahan ini terlihat jelas dalam pola pemungutan suara di berbagai negara, seperti perbedaan antara kota-kota besar dan pedesaan di Amerika Serikat atau di Indonesia.
9. **Polarisasi Generasi.** Polarisasi generasi terjadi ketika generasi yang berbeda memiliki pandangan politik yang sangat berbeda. Generasi yang lebih tua mungkin lebih konservatif dalam isu-isu tertentu, seperti kebijakan sosial, sementara generasi muda mungkin lebih

progresif dalam isu-isu yang sama. Contoh: Dalam beberapa negara, seperti di Inggris dan Amerika Serikat, generasi muda cenderung lebih mendukung kebijakan iklim yang progresif dan hak-hak minoritas, sementara generasi yang lebih tua cenderung lebih mendukung kebijakan tradisional.

10. **Polarisasi Kebijakan.** Polarisasi kebijakan terjadi ketika ada perbedaan tajam dalam pandangan tentang kebijakan publik, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau kebijakan luar negeri. Perbedaan ini sering kali melibatkan pandangan yang bertolak belakang tentang bagaimana masalah tertentu harus ditangani. Contoh: Dalam debat kebijakan kesehatan di banyak negara, ada perpecahan antara mereka yang mendukung perawatan kesehatan universal yang dibiayai negara dan mereka yang lebih mendukung pendekatan berbasis pasar yang didanai swasta.

Bentuk-bentuk polarisasi politik ini bisa terjadi secara terpisah atau bersamaan, memperburuk perpecahan dalam masyarakat. Ketika beberapa bentuk polarisasi saling berinteraksi, seperti polarisasi ideologis dan sosial, hal itu dapat memperkuat keterbelahan politik dan menghambat dialog yang konstruktif.

### **Dampak Polarisasi Politik**

Polarisasi politik dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Beberapa dampak dari polarisasi politik mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik yang saling memengaruhi satu sama lain. Berikut adalah beberapa dampak utama dari polarisasi politik:

1. **Melemahnya Kohesi Sosial.** Polarisasi politik cenderung memecah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan, yang dapat menyebabkan perpecahan sosial. Kohesi sosial, atau rasa persatuan dan solidaritas di antara warga negara, melemah ketika masyarakat lebih terpolarisasi. Orang-orang mulai mengelompok berdasarkan pandangan politik, dan interaksi antara kelompok dengan pandangan yang berbeda menjadi semakin terbatas. Dampak: Ini bisa mengarah pada meningkatnya ketegangan sosial, perpecahan antar komunitas, dan bahkan kekerasan di antara kelompok yang memiliki pandangan politik yang berbeda.
2. **Kebuntuan dalam Pembuatan Kebijakan.** Ketika polarisasi politik meningkat, kompromi politik menjadi semakin sulit dicapai. Dalam situasi ini, partai politik atau kelompok yang berbeda mungkin menolak bekerja sama atau menemukan solusi bersama untuk mengatasi masalah-masalah kebijakan. Polarisasi mengakibatkan kebuntuan politik, di mana proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan menjadi lambat atau bahkan terhenti. Dampak: Kebuntuan ini dapat memperlambat implementasi kebijakan publik penting, seperti reformasi ekonomi, perbaikan layanan kesehatan, atau pengelolaan krisis seperti bencana alam atau pandemi. Hal ini juga dapat mengurangi efektivitas pemerintahan dalam jangka panjang.
3. **Meningkatnya Konflik Politik.** Polarisasi sering kali menyebabkan konflik politik yang lebih intens di antara partai-partai atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik ini tidak hanya terjadi di parlemen atau ruang politik, tetapi juga bisa menyebar ke masyarakat umum, menciptakan ketegangan yang lebih besar di tingkat lokal atau komunitas. Dampak: Polarisasi dapat meningkatkan risiko kekerasan politik, seperti protes yang berujung kekerasan, serangan terhadap politisi atau aktivis, dan ketegangan antara kelompok sipil dan aparat keamanan. Ini juga bisa memicu disintegrasi politik, yang merusak stabilitas nasional.
4. **Radikalisasi Politik.** Meningkatnya polarisasi politik dapat mendorong sebagian masyarakat untuk bergerak ke arah radikalisme. Ketika perdebatan politik semakin intens dan ekstrem,

individu atau kelompok yang merasa tidak terwakili atau terpinggirkan mungkin terdorong untuk mendukung ideologi atau tindakan yang lebih radikal sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok lawan. Dampak: Radikalisasi ini dapat memperburuk konflik politik dan sosial serta meningkatkan risiko terorisme domestik, pemberontakan, atau gerakan separatis di beberapa negara.

5. Erosi kepercayaan pada Institusi. Polarisasi politik juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi negara, seperti parlemen, peradilan, media, dan pemerintahan secara umum. Ketika dua kubu politik yang berseberangan tidak lagi mempercayai institusi sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan mereka, maka legitimasi institusi tersebut akan dipertanyakan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Dampak: Hal ini dapat memicu krisis legitimasi, di mana masyarakat mulai meragukan kapasitas pemerintah dan lembaga negara untuk berfungsi secara adil dan efektif. Dalam jangka panjang, erosi kepercayaan ini dapat memperburuk krisis demokrasi dan membuka jalan bagi munculnya kepemimpinan otoriter.
6. Meningkatnya Populisme. Polarisasi politik sering kali menciptakan lingkungan yang subur bagi munculnya politisi populis, yang mengeksploitasi keterbelahan politik untuk memperoleh dukungan. Populisme sering kali muncul dengan retorika "kami vs mereka" yang memperdalam jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berseberangan. Dampak: Pemimpin populis sering kali menggunakan polarisasi untuk mendapatkan kekuasaan dan memperkuat posisi mereka dengan cara yang tidak demokratis, misalnya dengan melemahkan lembaga-lembaga independen atau mengabaikan aturan hukum. Ini bisa menyebabkan erosi demokrasi dan penguatan otoritarianisme.
7. Pengaruh Buruk Pada Kualitas Demokrasi. Demokrasi bergantung pada kemampuan untuk berdebat secara sehat, kompromi, dan menghormati perbedaan pendapat. Polarisasi politik, terutama jika ekstrem, dapat merusak proses-proses tersebut. Dengan tidak adanya dialog yang produktif dan kompromi, kualitas demokrasi menurun, karena ruang untuk negosiasi politik semakin sempit. Dampak: Dalam kondisi polarisasi yang ekstrem, pemilu bisa berubah menjadi ajang persaingan yang tidak sehat, di mana pihak yang kalah tidak mengakui hasilnya dan pihak yang menang berusaha untuk meminggirkan lawan politiknya. Hal ini bisa menyebabkan siklus ketidakstabilan politik dan melemahkan demokrasi.
8. Segmentasi Media dan Penyebaran Disinformasi. Polarisasi politik juga sering diperkuat oleh media yang bias dan penyebaran disinformasi. Media yang cenderung berpihak pada salah satu kubu politik sering kali memberikan informasi yang selektif, sehingga memperkuat bias yang ada dan menciptakan "ruang gema" (echo chamber) bagi masyarakat untuk mendengar pandangan yang sejalan dengan mereka. Dampak: Penyebaran disinformasi dan berita palsu dapat memperparah polarisasi dengan menghilangkan kepercayaan pada fakta atau kebenaran objektif. Ini juga membuat masyarakat semakin sulit untuk terlibat dalam diskusi yang berbasis fakta dan rasional, karena perbedaan persepsi tentang realitas yang berbeda.
9. Penurunan Solidaritas Nasional. Ketika polarisasi politik meningkat, rasa persatuan nasional bisa terancam. Ketegangan antara kelompok-kelompok politik atau ideologis yang berbeda bisa menggerogoti rasa solidaritas nasional, terutama dalam situasi krisis, seperti bencana alam, pandemi, atau konflik internasional. Dampak: Kurangnya solidaritas dapat menghambat upaya kolektif untuk menghadapi tantangan nasional. Dalam kasus ekstrim, polarisasi politik dapat menyebabkan disintegrasi nasional, di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan, bahkan bisa berujung pada perang sipil atau pemisahan wilayah.

10. Ketidakstabilan Ekonomi. Polarisasi politik juga dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi. Ketidakstabilan politik yang diakibatkan oleh polarisasi bisa menciptakan ketidakpastian bagi investor dan bisnis, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ekonomi yang tidak konsisten karena pergantian kekuasaan yang ekstrem dapat mengganggu pasar dan investasi jangka panjang. Dampak: Ketidakstabilan politik akibat polarisasi dapat menurunkan kepercayaan investor, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan memicu krisis ekonomi, terutama jika disertai dengan protes besar-besaran atau gangguan terhadap infrastruktur dan produksi.

Dampak polarisasi politik bisa sangat luas dan merusak, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Polarisasi yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam stabilitas negara, memperburuk konflik internal, dan merusak sistem politik di Indonesia.

### **Manfaat Polarisasi Politik**

Polarisasi politik dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik. Penelitian menunjukkan bahwa saat masyarakat terpolarisasi, partisipasi pemilih cenderung meningkat. Misalnya, jumlah pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, mencapai 70% pada pilpres 2014 dan 78% pada pilgub DKI Jakarta 2017 (Testriono, 2018). Ketika masyarakat terbelah, individu menjadi lebih sadar akan isu-isu politik dan lebih tertarik untuk memahami kebijakan serta kandidat yang ada. Polarisasi dapat mendorong diskusi dan debat yang lebih mendalam mengenai isu-isu penting, sehingga meningkatkan pengetahuan politik di kalangan masyarakat (Vinta, 2023). Kemudian polarisasi politik memungkinkan perbedaan kebijakan antara kandidat menjadi lebih jelas. Hal ini membantu pemilih dalam membuat keputusan yang lebih informasional berdasarkan kebijakan yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat. Dengan adanya perbedaan yang tajam, pemilih dapat lebih mudah menentukan pilihan mereka sesuai dengan nilai dan keyakinan pribadi (Nursani, 2023). Polarisasi juga dapat memicu diskusi yang konstruktif tentang ide-ide baru dan solusi terhadap masalah sosial. Dalam suasana yang terpolarisasi, individu didorong untuk menyampaikan pendapat mereka dengan lebih jelas dan berargumentasi secara efektif, yang bisa memperkaya wacana publik (Ahmad, 2023).

### **Penelitian Pendukung Polarisasi Politik**

Penelitian yang dilakukan oleh Mansyur, I. C. (2023). Dengan judul "Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka". Hasil penelitian menemukan bahwa aktor politik mengejar tujuan politik mereka dengan menggunakan strategi polarisasi, seperti memobilisasi pemilih hingga terpecah belah, menyebarkan ujaran kebencian, dan mengeksploitasi keresahan masyarakat. Kesimpulannya bahwa polarisasi politik yang terjadi antara Islamis dan pluralis di Indonesia pada 2014-2019 disebabkan oleh strategi aktor politik. Karim, A. G. (2019). Dengan judul penelitian "Mengelola polarisasi politik dalam sirkulasi kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi agenda riset". Temuan penelitian ini memetakan setidaknya ada dua kutub kluster besar yang berseberangan, pertama adalah kutub kluster populis pluralis dan kutub kluster populis islam. Temuannya menunjukkan bahwa wacana kebijakan Covid-19 justru menjadi ajang bagi perang sentimen masing-masing kubu, yang ternyata didominasi oleh buzzer dan sebagian kecil influencer. Sebaliknya, suara kelompok kritis dan rasional malah tenggelam oleh gaung dari para buzzer yang cenderung memiliki sentimen negatif.

Fernando, Z. J., Pratiwi, W., & Saifulloh, P. P. A. (2022). Dengan judul jurnal "Model Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Ancaman Polarisasi Politik Pemilu 2024 di

Indonesia". Hasil penelitian dari jurnal ini mengungkapkan bahwa polarisasi politik di Indonesia diprediksi akan kembali menguat menjelang Pemilihan Umum (PEMILU) 2024. Fenomena ini telah berlangsung sejak Pemilu 2014, terutama dengan persaingan antara kubu pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dan terus berlanjut hingga saat ini. Polarisasi politik ini dianggap berbahaya bagi iklim demokrasi Indonesia karena dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat, meningkatkan ketegangan sosial, serta memperburuk kualitas demokrasi. Penelitian ini menekankan bahwa polarisasi politik di Indonesia membawa dampak negatif, terutama dalam memperuncing perbedaan pandangan politik dan sosial. Untuk mengatasi ancaman polarisasi ini, peneliti mengusulkan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai solusi. Nilai-nilai Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, diharapkan dapat meredakan ketegangan politik dan mendorong terciptanya kerukunan sosial. Selain itu, peran tokoh elite politik, sosialisasi yang melibatkan masyarakat, serta penegakan hukum yang kuat juga disarankan sebagai langkah penting untuk mencegah dan meredakan polarisasi politik di masa mendatang.

Syarwi, P. (2022). Menemukan bahwa polarisasi isu, politik identitas telah menyebabkan kerusakan yang nyata merusak tenun kebangsaan pada pilpres 2019. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang kuat, tidak boleh ada lagi tempat atau ruang untuk membuka "kotak pandora" politik identitas dengan polarisasi isu yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, karena kerusakan dan dampaknya terlalu besar, polarisasi dan politik identitas tidak boleh terjadi lagi. Setidaknya ada 3 (tiga) cara yang mesti dilakukan untuk meredakan "politik identitas" dan "keterbelahan publik" dalam kontestasi elektoral pilpres 2024. Pertama; calon presiden minimal harus ada 3 pasang calon presiden, sehingga ada pemecang gelombang agar tidak terulang kembali kontestasi "rematch" pilpres 2014 dan 2019 dengan kekuatan "head to head" (bipolar) bertumpu pada dua kutub pasangan calon presiden. Kedua; harus ada penegakan hukum yang adil tanpa diskriminatif terhadap para buzzer politik, tim sukses, relawan maupun calon presiden apabila terbukti menggunakan politik identitas, sanksi yang keras dan tegas berupa pidana dan pemojangan masa waktu kampanye agar ada efek jera. Ketiga; harus ada "konsensus" dan komitmen bersama untuk "tidak" lagi menggunakan "narasi politik identitas" dan isu-isu "SARA" yang jelas merusak tatanan kehidupan berbangsa, rasa persatuan dan kesatuan bernegara.

Rianadiwa, S., Solakhudin, F., Salam, V. T., & Rahmawati, N. (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa polarisasi politik dapat terjadi dalam situasi dan kondisi apapun utamanya saat pemilu, kebijakan publik, isu-isu sosial budayatermasuk isu pasca debat Capres dan Cawapres. Penyebab terjadinya polarisasi politik tak lain adalah partai politik, media massa, pemekaran wilayah, konteks politik dan ideologi politik masyarakat. Polarisasi Politik mempunyai dampak positif dan negatif. Namun dari kedua dampak tersebut lebih banyak dampak negatifnya. Dampak negative yang dapat disebabkan terjadinya polarisasi politik yaitu Terciptanya perpecahan, Merusak institusi demokrasi, Menghilangnya kredibilitas partai politik, Berdampak terhadap pemerintahan, serta Menurunnya Kredibilitas Masyarakat sedangkan dampak positif hal dari polarisasi politik yaitu memperkuat hubungan dan Meningkatkan partisipasi dalam politik. Polarisasi politik akan sangat mudah terjadi ketika masyarakat atau para pendukung mudah terbawa isu-isu yang beredar di masyarakat seperti perbedaan ideologi, pilihan dan prinsip antar satu kubu dengan kubu yang lain. Beberapa hal upaya yang dapat mencegah polarisasi politik, yaitu: masyarakat harus dapat memilah dan milih isu yang beredar dan tidak terlalu fanatic terhadap pilihannya, menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila, dan mengimplementasikan nilai harmonisasi Bhineka Tunggal Ika.

Dewi, et al (2024). Meneliti terkait Pengaruh Penggunaan Tiktok terhadap Polarisasi Politik pada Pemilu Presiden di Indonesia: Studi Kasus pada Mahasiswa UNNES, menemukan bahwa TikTok telah menjadi ruang penting bagi mahasiswa UNNES untuk terlibat dan berpartisipasi dalam politik. Ini terjadi karena pengguna merasakan bahwa pertukaran ide politik menjadi lebih interaktif, personal, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun TikTok memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi politik, diperlukan pemahaman kritis, literasi media digital dan pendidikan politik agar partisipasi tidak hanya aktif tetapi juga informatif dan responsif terhadap kebutuhan demokrasi yang sehat dan agar tidak terjebak pada informasi yang menyesatkan.

## KESIMPULAN

Polarisasi politik bukan sebuah fenomena yang baru di Indonesia. Pada periode 1950-an, polarisasi politik di Indonesia menguat diakibatkan politik aliran. Namun, polarisasi politik menurun di bawah pemerintahan represif dan sentralistis pada era Orde Baru. Polarisasi politik pada era Reformasi, yang membuka keran politik di Indonesia, pada awalnya dapat ditekan, karena adanya fenomena yang oleh Ilmuwan politik disebut "dealiranisasi". Hingga pada tahun 2014, beberapa kajian politik menggambarkan polarisasi politik di Indonesia kembali menguat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab polarisasi di Indonesia disebabkan oleh strategi aktor politik. Kedua aktor politik yang sedang bertarung dikategorikan oleh beberapa ilmuwan politik sebagai tokoh populis. Selain itu, terdapat upaya pecah belah masyarakat, dengan melakukan pelabelan antar kelompok, adanya penggunaan ujaran kebencian, dan masing-masing aktor mencoba mengeksploitasi keresahan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrimadona. (2021). Revisiting Political Polarisation in Indonesia: A Case Study of Jakarta's Electorate. *Journal of Current Asian Affairs* 40(2):1-25.
- Ahmad, H. P. 2023. Polarisasi Politik. *Kumparan Com.* 14:06 Wib. <https://kumparan.com/pagili-ahmad/polarisasi-politik-1za0JTT8ppI>
- Al Azis, M. I., & Fatimah, S. (2023). Implikasi Demokrasi Pilkada Serentak 2024 Dan Polarisasi Politik Islam. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(2), 234-246.
- Dewi, N. F., Anggraini, D., Ghifari, T. A., Purwanto, B., Khanafi, Z. D. T., Firnandyn, A., ... & Setyoningrum, A. (2024). Pengaruh Penggunaan Tiktok terhadap Polarisasi Politik pada Pemilu Presiden di Indonesia: Studi Kasus pada Mahasiswa UNNES. *Jurnal Majemuk*, 3(4), 644-660.
- DiMaggio, P., Evans, J., & Bryson, B. (1996). Have American's Social Attitudes Become More Polarized? *American Journal of Sociology* 102(3):690-755.
- Druckman, J. N., Peterson, E., Slothuus, R. 2013. How Elite Partisan Polarization Affects Public Opinion Formation. *American Political Science*. Vol. 107, No. 1.
- Fernando, Z. J., Pratiwi, W., & Saifulloh, P. P. A. (2022, December). Model Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Ancaman Polarisasi Politik Pemilu 2024 di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 120-132).
- Fiorina, M. P., & Abrams, S. J. (2008). Political Polarization in the American Public. *Annual Review of Political Science* 11:563-88.
- Fossati, D. (2019). The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 38(2):119- 48.
- Jati, W. R. (2022). Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26(2).

- Karim, A. G. (2019). Mengelola Polarisasi Politik Dalam Sirkulasi Kekuasaan Di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset. *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10(2):215– 28.
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies* 40(7):832–57
- Mansyur, I. C. (2023). Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 1-22. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1>
- McCarty, N. (2019). *Polarization: What Everyone Needs to Know*. Oxford: Oxford University Press.
- McCoy, J., & Somer, M. (2019). Toward a Theory of Pernicious Polarization and How It Harms Democracies: Comparative Evidence and Possible Remedies. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 681(1):234– 71.
- Novelia . 2017. Media Sosial Membentuk Polarisasi Perilaku Politik. Di unduh pada 31 Agustus 2018 pada <https://www.validnews.id/MEDIA-SOSIAL-MEMBENTUK-POLARISASI-PERILAKU-POLITIK-LTF>
- Nursani, S. A. 2023. Polarisasi Politik Adalah Saat Pandangan Masyarakat Terbelah, Dampaknya?. *Detik News*. 14:47 Wib. <https://news.detik.com/berita/d-6786714/polarisasi-politik-adalah-saat-pandangan-masyarakat-terbelah-dampaknya>.
- Rianadiwa, S., Solakhudin, F., Salam, V. T., & Rahmawati, N. (2024). Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 4(01), 69–179. <https://doi.org/10.26593/jsh.v4i01.7548>
- Rif'an, A. 2018. Meredam Polarisasi pilpres 2019. Diunduh pada 29 Agustus 2018. <https://news.detik.com/kolom/d-4030659/Meredam-polarisasi-pilpres-2019>
- Susilawati, Y. (2023). Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik Pada Masa Pemilu 2024. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 2(2), 110-123.
- Syarwi, P. (2022). Polarisasi Isu, Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 4(1).
- Testriono, FNU. 2018. Polarisasi politik tak melulu buruk asalkan dua syarat terpenuhi. Diunduh pada 29 Agustus 2018. <https://theconversation.com/polarisasi-politik-tak-melulu-buruk-asalkan-dua-syarat-terpenuhi-92279>
- Ufen, A. (2006). *Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and 'Philippinisation.'* GIGA Working Papers.
- Vinta. 2023. Polarisasi Politik Sebaiknya Diarahkan Ke Hal Positif. *Radio Republik Indonesia*. 11:40 pm. <https://www.rri.co.id/nasional/320957/polarisasi-politik-sebaiknya-diarahkan-ke-hal-potitif>
- Warburton, E. (2020). *How Polarised Is Indonesia and Why Does It Matter? In Democracy in Indonesia From Stagnation to Regression?* Singapore: ISEAS Publishing.